

**TRANSPARANSI DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten**  
**Pesawaran)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**AMBAR VERONICA**

**NPM. 1621020370**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1441 H/2020 M**

**TRANSPARANSI DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten  
Pesawaran)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**AMBAR VERONICA**

**NPM. 1621020370**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H**

**Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/ 2019 M**

**TRANSPARANSI DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di  
Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh**

**AMBAR VERONICA**

**NPM. 1621020370**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H**

**Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

## ABSTRAK

Dana desa merupakan suatu dana yang berasal dari pemerintah pusat dan diperuntukkan untuk desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi pada zaman Islam juga sudah dipraktikan oleh al-Khulafa al-Rasyidin yaitu pada masa kepemimpinan Umar ibn al-Khaththab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didalam pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sudah mencerminkan prinsip transparansi, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya plang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di depan balai desa, tersedianya laporan mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangan, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat serta terdapat sistem pemberian informasi pada publik. Kesimpulan penelitian ini adalah didalam pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam perspektif hukum Islam terhadap transparansi dana desa juga sudah sesuai dengan hukum Islam, karena konsep transparansi dalam hukum Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad SAW yaitu *shiddq, amanah, fathonah* dan *tabligh*.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ambar Veronicha

NPM : 1621020370

Fakultas : Syariah

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Judul : Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Khairuddin, M.H**

**NIP. 196210221993031002**

**Marwin, S.H., M.H**

**NIP. 197501292000031001**

Ketua Jurusan

**Frenki, M. Si**

**NIP. 198003122009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”, disusun oleh Ambar Veronicha, NPM: 1621020370, program studi Siyasaah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. H. A. Kumed Jafar, S.Ag., MH

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H

Penguji III : Marwin, S.H., M.H



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. (Q.S An-Nisaa’:58)*



## PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

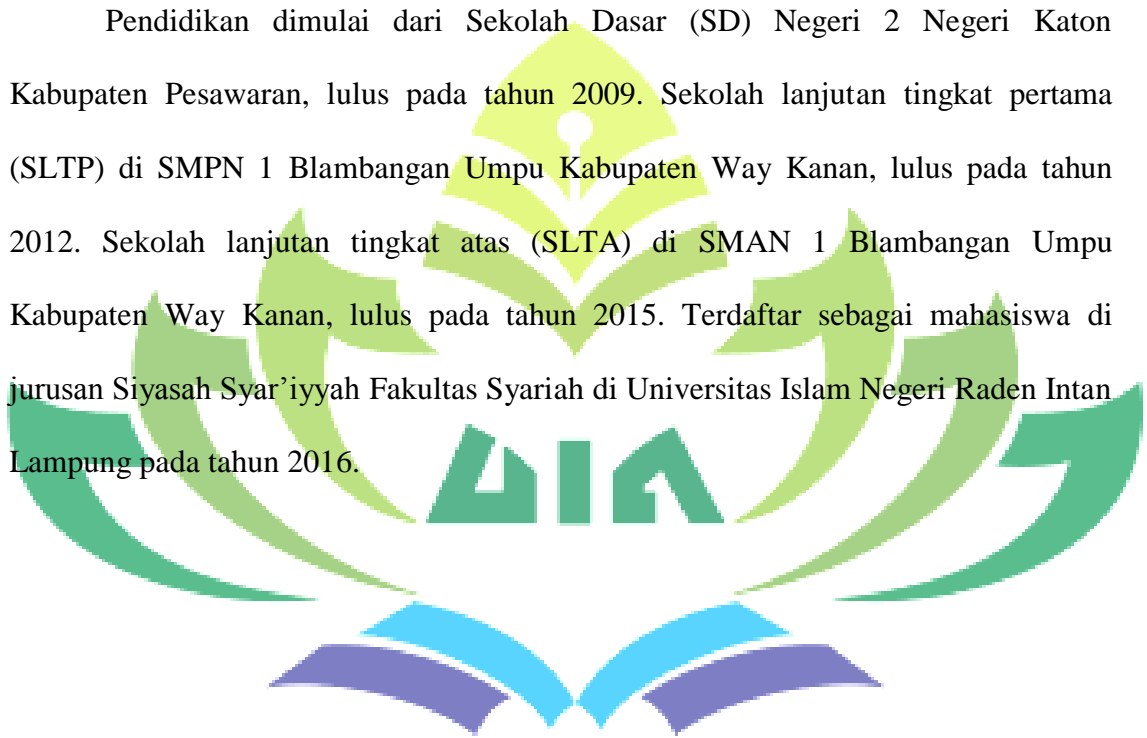
1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Guswanto dan Ibundaku Evi Indarsih, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada kedua adikku Reda Bagus Patria dan Willya Veronicha dan kepada keluargaku dimanapun berada terimakasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
3. Terimakasih untuk penyemangatku Hadi Iskandar Wiranata yang sudah selalu sabar mendampingi penulis dari tahap pertama hingga selesai.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Ambar Veronicha seorang anak perempuan yang dilahirkan di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1997 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Guswanto dan Evi Indarsih.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, lulus pada tahun 2009. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di SMPN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2012. Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2015. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“TRANSPARANSI DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”**. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Marwin, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan daerah provinsi Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syariah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bandar Lampung beserta staf-staf jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Desa Negeri Ulangan Jaya kecamatan Negeri Katon bapak Ehwan Muslim dan para perangkat Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang telah membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
10. Ayah dan ibu yang selalu memberikan perhatiannya, doa, dukungannya, serta kasih sayang dan semangat.



11. Saudara-saudariku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
12. Sahabat-sahabatku di UIN terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas H yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Sahabat-Sahabatku Friends Until Jannah (Sindika, Fiky, Ade, Melani, Sagita, Inayah, Tiya, Nurmala, Sayma).
14. Sahabat-sahabat KKN ku Tama, Dela, Rani, Rita, Yayang, Yanti, Wiwit, Halimah, Cahya, Riki, Akbar.
15. Sahabat kamar ku (Hafidzoh, Nira, Tiana).

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 26 September 2019

Penulis

Ambar Veronicha

NPM 1621020370

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TRANSPARANSI DANA DESA.....</b>	
A. Pengertian Tentang Desa .....	18
1. Pengertian Desa.....	18
2. Pengertian Desa Menurut Para Ahli.....	20
3. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang .....	21
B. Sejarah Hukum Pemerintahan Desa.....	23

1. Sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia .....	23
2. Sejarah Pemerintahan Desa Pada Masa Kolonial Hindia Belanda .....	25
3. Sejarah Pemerintahan Desa Pada Masa Pendudukan Jepang.....	28
4. Sejarah Pemerintahan Desa Pada Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia	30
C. Keuangan Desa .....	35
1. Dasar Hukum Keuangan Desa .....	36
2. Sumber Keuangan Desa .....	38
D. Transparansi Menurut Islam .....	41
1. Pengertian Transparansi .....	41
2. Dasar Hukum Tentang Transparansi Menurut Islam .....	44
E. Tinjauan Pustaka.....	49
<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN .....</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran .....	56
B. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran .....	59
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran .....	64
D. Pengelolaan Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran .....	66
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	
A. Transparansi Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran .....	80
B. Transparansi Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Perspektif Hukum Islam .....	85



**BAB V PENUTUP.....**

A. Kesimpulan ..... 93

B. Rekomendasi..... 94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Arista Widiyanti.....	49
2. Penelitian Wenda Damayanti.....	50
3. Penelitian I Wayan Irvan M.....	51
4. Penelitian Hanni Andini.....	52
5. Penelitian Miftahuddin.....	53
6. Urutan Jabatan Kepala Desa Negeri Ulangan Jaya.....	57
7. Urutan Sekertaris Desa Negeri Ulangan Jaya .....	58
8. Jabatan Kasi-Kaur Desa Negeri Ulangan Jaya .....	59
9. Urutan Jabatan Kepala Dusun Desa Negeri Ulangan Jaya .....	59
10. Tingkat Pendidikan Desa Negeri Ulangan Jaya .....	60
11. Mata Pencaharian Penduduk/Pekerja Desa Negeri Ulangan Jaya .....	61
12. Pola Penggunaan Tanah Desa Negeri Ulangan Jaya .....	62
13. Kepemilikan Hewan Ternak Desa Negeri Ulangan Jaya.....	63
14. Sarana dan Prasarana Desa Negeri Ulangan Jaya.....	63
15. Kondisi Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Negeri Ulangan Jaya.....	64
16. Pengumpulan Data Responden Menggunakan Kuisisioner.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Negeri Ulangan Jaya  
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 ..... 65







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Transparansi adalah sifat tembus pandang atau kejernihan.<sup>1</sup> Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksana pemerintahan, baik pusat maupun yang di bawahnya.<sup>2</sup>
2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1568

<sup>2</sup> Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: PrenadaMedia Group, , 2015), h. 212

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

3. Hukum Islam merupakan segala ketentuan Allah mengenai segala perbuatan hamba yang harus dijalani, diikuti, dipatuhi dan ditaati serta mempunyai sanksi hukum bagi siapa saja yang menyalahinya.<sup>4</sup> Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil'alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat.<sup>5</sup>

4. Desa Negeri Ulangan Jaya merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. Dengan batas wilayah sebelah utara Desa Haduyang, sebelah selatan PTPN VII Rejosari, sebelah timur Branti Raya, dan sebelah barat Negara Saka.<sup>6</sup>

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis mengenai ***“Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum***

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 ayat (9)

<sup>4</sup> Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam* (Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2015), h. 10

<sup>5</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2018), h. 79

<sup>6</sup> Desa Negeri Ulangan Jaya, (On-line), tersedia di: <http://negeriulanganjaya.id.htm> (10 September 2019)

***Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon  
Kabupaten Pesawaran)”***

**B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain:

1. Alasan Objektif

Berdasarkan isu yang beredar di masyarakat, banyak masyarakat yang berasumsi bahwa didalam pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya tidak transparan sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan terdapat di Bab II (Asas Pengelolaan Keuangan Desa) Pasal 2, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk melihat apakah didalam penggunaan dan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, dan apakah sudah mencerminkan dengan prinsip transparansi.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi ini yaitu Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (*Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran*) dan memiliki keterkaitan dengan program



studi yang sedang ditempuh peneliti, yaitu prodi siyasah (Hukum Tata Negara)

- b. Daerah penelitian sangat mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung baik teori (buku-buku) atau data lapangan.

### C. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup> Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Wali kota melalui camat kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat dan menyampaikan pokok-pokok

---

<sup>7</sup> Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 286

pertanggungjawabannya namun harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan sebagainya dilakukan oleh Kabupaten dan Kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.<sup>8</sup>

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati/Wali kota dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Pengeluaran-pengeluaran desa dapat digolongkan atas pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, dan pekerjaan-pekerjaan pembangunan.

Berkaitan dengan transparansi dana desa sangat dibutuhkan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, salah satu prinsipnya adalah *transparency* (terbuka), transparansi yang dibangun atas

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 287

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 290

dasar kebebasan arus informasi. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksana pemerintah, baik pusat maupun yang dibawahnya.<sup>10</sup> Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah ketika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, seperti keterbukaan, keterlibatan serta kemudahan akses masyarakat. Demikian halnya pemerintahan desa sebagai salah satu badan publik juga patut menjaga keterbukaan informasi. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan agar pembangunan desa dapat berlangsung secara kondusif. Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintahan desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat.

Dana desa merupakan berkah yang berpotensi menjadi bencana. Pasalnya jika tidak dikelola dengan baik, dana berjumlah milyaran tersebut akan berubah menjadi bencana. Semakin menguatnya posisi desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntutan publik yaitu tata kelola pemerintahan desa berlangsung secara akuntabel. Banyak sekali isu yang beredar di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran bahwa didalam pengelolaan dana desa tidak transparan, hal ini mereka katakan bahwa jumlah dana desa yang turun dari pemerintah dan dialokasikan untuk apa saja mereka tidak mengetahui, dan yang tahu terkait

---

<sup>10</sup> Ubaedillah, *Op. Cit*, h. 212

dana desa hanya segelintir orang saja, sedangkan jika dilihat dari didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang transparansi dana desa khususnya didalam pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dengan menekankan pada prinsip transparansi. Pasalnya jumlah nominal dana desa yang diberikan cukup besar, dan didalam pengelolaanya apakah sudah berdasarkan prinsip transparansi.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring informasi.<sup>11</sup> Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

---

<sup>11</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 44

Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (*Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*). Maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.



2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

## **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang transparansi dana desa.
2. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang transparansi dana desa.

### **b. Secara Praktis**

1. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi Fakultas Syariah.
2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).

## H. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.<sup>12</sup> Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Dalam penelitian ini dikhususkan tentang Transparansi Dana Desa.

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat

---

<sup>12</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 2.

penelitian dilakukan.<sup>13</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.<sup>14</sup>

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang di dapat dari perangkat desa (Kepala Desa berjumlah 1 orang, Sekretaris Desa berjumlah 1 orang, dan Kepala urusan keuangan berjumlah 1 orang, masyarakat berjumlah 47, serta Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 7 orang) di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.<sup>16</sup> Data

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka cipta, Cetakan kedua, 1993), h.309

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), h. 105

<sup>15</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 40

sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Metode Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.<sup>17</sup> Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>18</sup>

Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap dana desa yang diterima di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri katon Kabupaten pesawaran dan kemudian digunakan untuk apa saja dana desa tersebut.

#### **b. Metode Wawancara (Interview)**

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>19</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara

---

<sup>17</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2015), h. 105

<sup>18</sup> Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan kelima, 2011), h. 118

<sup>19</sup> Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 1995), h. 192

membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditunjukkan kepada aparat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala urusan keuangan, masyarakat, serta Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.

#### **c. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>21</sup> Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada

---

<sup>20</sup> *Manajemen Penelitian, Ibid, h. 274*

<sup>21</sup> *Penelitian Kualitatif, Ibid, h. 125*



kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>22</sup> Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa (kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 570 orang, yang terdiri dari: kepala desa berjumlah 1 orang, sekretaris desa berjumlah 1 orang, kepala urusan keuangan berjumlah 1 orang, masyarakat berjumlah 560 dilihat dari jumlah kepala keluarga, dan Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 7 orang.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 173

<sup>23</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 53

## b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>24</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa untuk sekedar perkiraan, maka bila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>25</sup>

Sesuai penjelasan diatas karena populasinya lebih dari 100 maka diambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian untuk dijadikan sampel. Jadi 10% dari 570 adalah 57,0 dibulatkan menjadi 57 orang yang akan dijadikan sampel di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu.<sup>26</sup> *Purposive sampling* juga disebut dengan *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karena itu, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010), h. 116

<sup>25</sup> Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 104

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 122

mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya:

### a. Tahapan *Editing*

*Editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *Editing* yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

### b. Sistematika Data (*sistemating*)

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 6. Metode Analisa Data

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan transparansi dana desa.

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan transparansi dana desa perspektif hukum Islam di desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran



## BAB II

### TRANSPARANSI DANA DESA

#### A. PENGERTIAN TENTANG DESA

##### 1. Pengertian Desa

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dari kata “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dopelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau yang punya sifat “kampungan”. Pemahaman ini sama persis dengan arti kata “kampong”, yakni kolot, kuno, lama, tradisional.<sup>27</sup> Istilah “Desa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.<sup>28</sup> Sedangkan “kampung” sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan.<sup>29</sup>

Desa dapat di definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat

---

<sup>27</sup> Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 1.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 318.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Pustaka, 1995), h. 226.



istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administrasi (*administrative entity*), tetapi sebagai etnis hukum (*legal entity*) yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan.<sup>30</sup>

Pengertian desa dilihat dari segi sosiologis-kultural-demografis bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.<sup>31</sup>

Desa dilihat dari pengertian sosiologis, menunjukkan gambaran adanya kebersamaan, kejujuran selain juga gambaran tentang kebodohan dan keterbelakangan. Pada umumnya ciri keterbelakangan seperti sebagian buta huruf, masyarakatnya bertani, masih belum mengenal teknologi tinggi dan masih menggunakan bahasa pengantar bukan bahasa Indonesia, menjadi citra dari desa. Desa juga dipandang sebagai salah satu bentuk dari kehidupan bersama yang terdiri dari beberapa ribu orang,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>31</sup> Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Bandung: CV. Armico, 1998), h. 12

hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan hidup di pertanian, terdapatnya ikatan keluarga yang rapat, taat pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.<sup>32</sup>

## 2. Pengertian Desa Menurut Para Ahli

a. **Bambang Utoyo** mendefinisikan bahwa Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian pertanian dan menghasilkan bahan makanan.

b. **R. Bintarto** mendefinisikan bahwa Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.<sup>33</sup>

c. **Sutarjo Kartohadikusumo** mendefinisikan bahwa Desa merupakan kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>34</sup>

d. **William Ogburn dan MF Nimkoff** mendefinisikan bahwa Desa merupakan kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

---

<sup>32</sup> *Hukum Pemerintahan Desa, Ibid*, h. 9

<sup>33</sup> Firman Sujadi, et. al. *Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), h. 293

<sup>34</sup> Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Balai Aksara, 1989), h. 13

e. **Paul H Landis** mendefinisikan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.<sup>35</sup>

f. **Unang Sunardjo** mendefinisikan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang terpilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.<sup>36</sup>

### 3. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 294

<sup>36</sup> *Hukum Pemerintahan Desa, Ibid*, h. 5

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>38</sup> Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 ayat (1)

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (12)

<sup>39</sup> *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Ibid*, h. 286

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>40</sup>

## **B. SEJARAH HUKUM PEMERINTAHAN DESA**

### **1. Sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Bahkan desa telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Hal ini mengacu pada prasasti Kawali di Jawa Barat sekitar tahun 1350 M, dan prasasti Walandit di daerah Tengger di Jawa Timur pada tahun 1381 M. Prasasti itu dikirimkan pada tahun 1939 oleh A. Gall di kota Surabaya ke kantor Dinas Purbakala di kota Jakarta. Barangkali asalnya dari daerah Singasari. Seluruh penulisan telah dibaca dan ditinjau oleh Prof. Dr. J.G. de Casparis. Hasil peninjauannya disiarkan dalam majalah *Inscripties Van N.J.*<sup>41</sup> Berdasarkan prasasti tersebut, desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan murni asli Indonesia bukan bentukan Belanda.<sup>42</sup>

Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau.<sup>43</sup> Sebagai bukti bahwa desa itu telah beratus-ratus tahun yang lalu, dapat dari peninggalan sejarah berupa tulisan pada benda-benda sejarah.

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)

<sup>41</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan kelurahan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 14

<sup>42</sup> *Tata Kelola Keuangan Desa, Ibid*, h. 287

<sup>43</sup> Nasroen, *Daerah Otonomi Tingkat Bawah* (Jakarta: Beringin Tranding Company, 1995), h.

Menurut Bayu Suryaningrat, dari tulisan prasasti-prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Desa sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak dahulu kala dan bukan impor dari luar Indonesia, malah murni bersifat Indonesia. Tampaknya desa adalah tingkat yang langsung dibawah kerajaan. Dengan kata lain, pada waktu terhadap sistem pemerintahan di daerah dua tingkat.
- b. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala telah mengenal sistem Pemerintahan Daerah, dan yang sekarang menjadi hakikat dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, swatantra (yaitu yang disebut sekarang sebagai otonomi atau hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri).<sup>44</sup>

Suatu desa terbentuk dari kelompok masyarakat akibat sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan, adat istiadat dan budaya serta kepentingan yang sama untuk menangkal bahaya dari luar dan mengurus wilayahnya.

Desa sejak dahulu merupakan wilayah-wilayah yang mandiri (otonom), dalam mengatur wilayah dan penduduknya sesuai dengan desa adat dan tata caranya sendiri. Desa memiliki susunan yang asli sesuai adat istiadatnya, oleh karenanya Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan desa. Dengan demikian, segala peraturan negara yang

---

<sup>44</sup> Zuhraini, *Op.Cit*, h. 21-22



berkenaan dengan desa tak akan melupakan hak-hak asal usul desa tersebut. Oleh sebab itu, keberadaanya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>45</sup>

Desa biasanya identik dengan sebuah tempat yang hijau dan letaknya jauh dari kota. Namun, desa tidak hanya terletak di kaki gunung yang hijau, tetapi terdapat juga di dekat pantai bahkan di pinggiran sebuah kota. Kehidupan sehari-hari masyarakat di desa masih tradisional. Pada umumnya, masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh tani, berladang, dan beternak. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani, berladang/berkebun, buruh tani atau beternak. Pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. Sedangkan desa yang berada di pinggiran sebuah kota, sebagian penduduknya ada yang mencari pencahariannya di kota.<sup>46</sup>

## **2. Sejarah Pemerintahan Desa Pada Masa Kolonial Hindia Belanda**

Jauh sebelum kedatangan Belanda, desa dan yang sejenis dengan itu telah ada dan mapan di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan hukum adat setempat. Setelah pemerintahan Belanda memasuki Indonesia dan membentuk undang-undang tentang

---

<sup>45</sup>*Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa, Ibid*, h. 287

<sup>46</sup>*Ibid* h. 288

pemerintahan di Hindia Belanda (*Regeling Reglamen*), desa diberi kedudukan hukum. Untuk menjabarkan perundangan tersebut, Belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)*, yang hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. *Regeling Reglemen* pada tahun 1924 diubah dengan *Indische Staatsregeling* akan tetapi pada prinsipnya tidak ada perubahan, oleh karena itu IGO masih tetap berlaku. Kemudian untuk daerah luar Jawa, Belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewsten* atau disingkat (IGOB) tahun 1938 Nomor 490.<sup>47</sup>

*Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)* adalah salah satu peraturan zaman penjajahan yang umurnya panjang, artinya bahwa berlakunya peraturan tersebut jauh memasuki jaman R.I.<sup>48</sup> Adapun hal-hal pokok yang dapat diketahui dari IGO adalah sebagai berikut:

- a. Menurut IGO bahwa yang disebut Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan beberapa orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Disini nampak tidak ada kepastian berapa yang dimaksud berapa orang itu, dengan demikian jumlah itu relatif, tergantung desa-desa tersebut. Mengenai jabatan beberapa orang itu juga tidak disebutkan menjabat sebagai apa.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 288

<sup>48</sup> *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan, Ibid*, , h. 79

- b. Mengenai struktur atau susunan organisasi pemerintahan desa tidak diatur disini, tetapi akan ditetapkan oleh presiden.
- c. Pemerintah Desa wajib menjaga dan memelihara sarana-sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran air, lapangan, tanah-tanah, pasar dan sebagainya.
- d. Tugas, kewajiban dan kewenangan Kepala Desa antara lain:
  - 1. Bertanggungjawab atas keuangan dan kekayaan yang dimiliki desa.
  - 2. Kepala Desa mewakili desa dalam dan di luar hukum.
  - 3. Kepala Desa menjaga agar pemerintahan desa berjalan baik.<sup>49</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya.<sup>50</sup>

Desa berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun territorial. Desa adalah masyarakat hukum adat yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah Pemerintahan terdapat dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum.

Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahan desa ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Tugas, kewenangan, serta lingkup pemerintahan meliputi bidang perundangan, pelaksanaan,

---

<sup>49</sup> *Administrasi Pemerintahan Desa, Ibid*, h. 20

<sup>50</sup> *Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa, Ibid*, h. 288

keadilan dan kepolisian. Dengan demikian desa pada masa kolonial Belanda memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur masing-masing wilayah tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Hak ini adalah hak mengatur kekuasaan atas tanah dan perairan di atasnya, termasuk ruang lingkup kekuasaan dari desa tersebut.

Badan perwakilan Desa pada kolonial Belanda dinamakan Dewan Desa. Pemerintahan Desa didampingi oleh Dewan Desa yang berfungsi sebagai lembaga pembuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. Dengan demikian sejak masa pemerintahan kolonial, bangsa Indonesia telah mengenal lembaga pembuat peraturan-peraturan di tingkat desa.

Ada tiga unsur penting dari desa menurut IGO, yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dan urusan-urusan pemerintahan, dalam pelaksanaan tugasnya harus memperhatikan pendapat desa. Didalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa dibantu Pamong Desa yang sebutannya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk hal-hal yang penting Kepala Desa harus tunduk pada rapat desa.<sup>51</sup>

### **3. Sejarah Pemerintahan Desa Pada Masa Pendudukan Jepang**

Jepang berkuasa di Indonesia secara resmi sejak tanggal 8 maret 1942, saat Panglima Tertinggi Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati,

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 289

Subang. Saat menguasai Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan dikendalikan oleh balatentara Jepang yang dikuasai oleh Angkatan Darat yang berkedudukan di Bukittinggi, sedangkan wilayah lainnya (Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua) dikuasai oleh Angkatan Laut yang berkedudukan di Ujung Pandang.

Singkatnya masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) menyebabkan tidak banyaknya perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan termasuk pemerintahan desa pada masa tersebut. Peraturan peninggalan Hindia Belanda yaitu IGO untuk desa-desa di Jawa dan Madura serta IGOB untuk desa-desa di luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku.<sup>52</sup> Hanya saja, seperti tercantum pada Osamo Seirei (Undang-Undang) Nomor 1 tahun 1942, beberapa sebutan daerah dan kepala daerahnya diganti dengan bahasa Jepang seperti Syu (Karasidenan yang dipimpin oleh Syucho, Si (Kotamadya yang dipimpin oleh Sicho), Ken (Kabupaten yang dipimpin oleh Kencho), Gun (Kawedanan dipimpin oleh Guncho), Son (Kecamatan yang dipimpin oleh Suncho, dan Ku (Desa yang dipimpin oleh Kucho).

Dapat dikatakan pemerintahan secara umum menghapuskan demokrasi dalam pemerintahan daerah walaupun khusus untuk Ken, Si dan Tokubelu Si sistem itu dilaksanakan secara terbatas. Begitu juga halnya dengan pemerintahan desa, pada prinsipnya IGO dan peraturan lainnya tetap

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 289

berlaku dan tidak ada perubahan. Untuk itu desa tetap ada dan berjalan sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Satu-satunya peraturan mengenai desa yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Jepang adalah Osamo Seirei Nomor 7 Tahun 2604 (1994) yang hanya mengatur dan mengubah pemilihan Kepala Desa (Kuncho) dengan masa jabatan Kepala Desa ditetapkan menjadi 4 (empat) tahun. Penetapan masa jabatan tersebut berlanjut sampai Indonesia merdeka sebelum diubah menjadi 6 (enam) tahun berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.<sup>53</sup>

#### **4. Sejarah Pemerintahan Desa Pada Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia.**

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan di segala bidang kehidupan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kejiwaan yang bertentangan dengan martabat bangsa yang merdeka dihapuskan secara bertahap dan diganti dengan yang sesuai dan layak di alam kemerdekaan. Kegiatan untuk menyiapkan Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Desa sebagai IGO dan IGBO pun mengalami hambatan yang tidak kecil sehingga hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang terdapat dalam IGO dan IGBO diatasi oleh peraturan-peraturan derajatnya di bawah Undang-Undang. Dengan sendirinya pengertian tentang Desa atau

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 290

yang semacam dengan Desa pun masih tetap seperti pada masa dahulu dengan sedikit penambahan di sana-sini.

Setelah disahkannya Undang-Undang Desapraja tahun 196, sebagai pengganti IGO dan IGBO, didapatkan pengertian tentang desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Pasal 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan Desapraja yaitu : *“Desapraja adalah kesatuan masyarakat Hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri”*.<sup>54</sup> Jadi berdasarkan Undang-Undang tersebut Desapraja hanyalah nama baru bagi Desa yang sudah ada sejak berabad-abad yang lampau dan memiliki pengertian sama.

Undang-Undang Desapraja tidak berumur lama, sebab ketika Orde Baru lahir, Undang-Undang yang jiwanya dan sistem pengaturannya akan dapat membawa kearah ketidakstabilan politik di desa-desa, dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Selama sepuluh tahun kemudian sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa-desa di seluruh Indonesia tidak memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang. Selama jangka waktu tersebut pengertian tentang Desa diambil dari sumber baik dari peraturan-

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Pasal 1



peraturan maupun dari pendapat para ahli.<sup>55</sup> Pengertian desa yang didasarkan kepada Undang-Undang yang dapat dipergunakan sebagai pegangan atau patokan bagi berbagai kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintahan baru terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pasal 1 huruf a yaitu : *“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*<sup>56</sup>

Sebagai akibat logis adanya pengertian atau batasan desa secara resmi sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka sekaligus terjadi pula keseragaman sebutan atau nama yaitu Desa. Beragam bentuk atau corak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dengan sebutan atau nama setempat seperti *Marga* di Palembang Sumatera Selatan, *Nagari* di Sumatera Barat, *Gampong* di Aceh, *Lembang* di Toraja Sulawesi Selatan, *Wanua* di Sulawesi Utara, *Huta* atau *Kuta* di Tapanuli Sumatera Utara dan lain-lainnya, yang tersebar diseluruh Indonesia tidak terakomodir secara resmi. Meskipun

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 291

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 huruf (a)

pada prakteknya masih banyak masyarakat setempat yang berada di luar Jawa dan Madura masih menyebut desanya dengan nama atau sebutan yang setempat. Dalam perjalanan sejarah berikutnya hingga berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, desa telah mengalami perubahan baik yang menyangkut aspek yuridis formal maupun yang berkaitan dengan luas wilayah, sistem dan pola ketahanan masyarakat, prasarana dan sarana, sumber-sumber penghasilan, sistem administrasi pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan lain-lain.

Meskipun telah banyak mengalami perubahan baik aspek yuridis formal maupun yang berkaitan dengan wilayah, tata kelola administrasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, sumber-sumber penghasilan desa dan lain-lainnya pada hakikatnya ada beberapa hal yang disarikan yang melekat pada setiap desa yang tidak mudah berubah karena perubahan zaman, yaitu:

- a. Desa merupakan suatu organisasi ketatanegaraan terkecil dan paling sederhana dalam suatu negara.
- b. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan Negara.
- c. Pemerintahan Desa merupakan symbol formil dari kesatuan masyarakat.

- d. Pemerintahan Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki hak dan wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonom/pemerintahan sendiri), juga berwenang dan kekuasaan sebagai limpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya.
- e. Berada alam suatu wilayah yang memiliki batas-batas yang jelas dan tertentu.
- f. Terdapat penduduk atau masyarakat dalam jumlah yang cukup besar sampai persyaratan, yang hidup secara tertib dan bertempat tinggal pada lokasi-lokasi yang cukup tetap.
- g. Kepala Desa dipilih secara langsung, bebas dan rahasia oleh Penduduk Desa yang berhak.<sup>57</sup> Pemimpin yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan istilah Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah), Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat, Banten), Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh), Pengulu Andiko (Sumatera Barat), Penyimpang, Kepala Marga (Sumatera Selatan), Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon), Raja Penusunan (sekitar Danau Toba), Kesair Pengulu (Karo Batak), Parek, Klian (Bali),

---

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 292

Marsaoleh (Gorontalo), Komelaho (Bolang Mongondow, Kalimantan Selatan).<sup>58</sup>

- h. Memiliki sumber kekayaan sendiri.
- i. Memiliki Landasan Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakatnya bersama aparatur Pemerintahan Desa.
- j. Mempunyai nama yang tetap dan lestari serta mengandung makna tertentu bagi masyarakatnya.<sup>59</sup>

### C. KEUANGAN DESA

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.<sup>60</sup> Hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang dimaksudkan terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa

Sumber pendapatan asli desa terdiri atas:

- a. Hasil usaha desa
- b. Hasil kekayaan desa

---

<sup>58</sup> Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Balai Aksara, cetakan keempat, 1979), h. 30

<sup>59</sup> *Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa, Ibid.*, h. 292

<sup>60</sup> *Hukum Pemerintah Desa, Ibid.*, h. 141

- c. Hasil swadaya dan partisipasi
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.<sup>61</sup>
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
  3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
  4. Bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
    - a. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah dan
    - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.<sup>62</sup>
  5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.<sup>63</sup> Pemerintah desa dapat menerima sumber dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah (tidak melawan hukum yang berlaku), misalnya dari yayasan, badan, dan organisasi non pemerintah lainnya.<sup>64</sup>

## **1. Dasar Hukum Keuangan Desa**

Ketentuan pokok regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bab VIII Pasal 7-75 tentang keuangan dan aset desa, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa Bab VI Pasal 90-105 tentang

---

<sup>61</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 131

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 131

<sup>63</sup> Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit*, h. 290

<sup>64</sup> Talizidu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, cetakan ketiga, 1991), h. 115

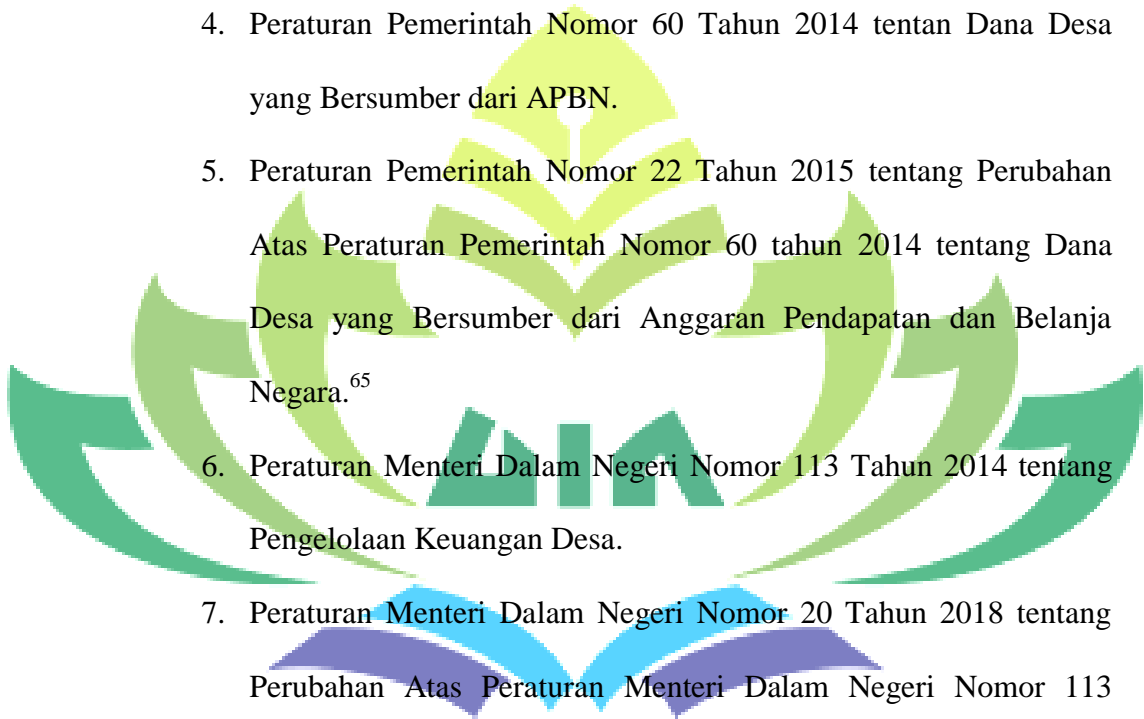
Keuangan Desa, Pengalokasian bersumber dari APBN dan APBD, Penyaluran, Belanja Desa, APBDes, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, PP Nomor 60 tahun 2014 yang kemudian diubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan pokok tersebut selanjutnya dijabarkan secara detil/teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 247/PMK.07/2015 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan seterusnya yang akan diperbarui tiap tahun. Dengan demikian pengelolaan keuangan desa wajib merujuk pada tiga peraturan menteri di atas agar terhindar dari kekeliruan.

Peraturan-Peraturan lain yang juga menjadi dasar pengelolaan keuangan desa adalah Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten tentang Keuangan Desa, serta Peraturan Bupati masing-masing kabupaten tentang keuangan desa, serta Peraturan Desa di setiap desa tentang RKPDes dan APBdes.

Berikut ketentuan-ketentuan regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan desa :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>65</sup>
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **2. Sumber Keuangan Desa**

Pendapatan desa ialah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber ialah

---

<sup>65</sup> Firman Sujadi, et. al, *Tata Kelola Keuangan Desa dan pembangunan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016) h. 206



sumber-sumber penerimaan atau penghasilan desa yang sah pula.<sup>66</sup>

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.<sup>67</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)<sup>68</sup>, pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penyusunannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, dan karena itu Anggaran Negara dilakukan dengan menganut prinsip berimbang (balance-budget), yakni untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan keuangan negara sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat menghimpun tabungan pemerintah yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan. Adapun susunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara ialah sebagai berikut:

- a. Anggaran pendapatan rutin.
- b. Anggaran belanja rutin.
- c. Anggaran pendapatan pembangunan.
- d. Anggaran belanja pembangunan.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Ibid*, , h. 113

<sup>67</sup> *Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa, Ibid*, h. 207

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

4. Alokasi Dana desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.<sup>70</sup>

5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, merupakan hak desa. Hal ini berarti dari sisi negara dan pemerintah daerah, ketiga jenis belanja tersebut adalah “belanja wajib” yang harus dialokasikan ke desa. Sebagai hak, maka desa harus mengetahui dan menuntut besaran alokasi dari belanja wajib sesuai dengan formula perhitungan dan mekanisme penyaluran.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Basir Barthos, *Pengetahuan Anggaran Belanja Negara Rutin dan Pembangunan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, cetakan pertama, 1990), h. 2

<sup>70</sup> Riska Apriliana, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017), h. 37

<sup>71</sup> *Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa, Ibid*, h. 208

## D. TRANSPARANSI MENURUT ISLAM

### 1. Pengertian Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses, lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.<sup>72</sup> Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang handal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

---

<sup>72</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 24

yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>73</sup>

Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara mengikuti hukum dan peraturan. Transparansi juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti. Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan serta mudah dimengerti. Transparansi semakin urgen dalam sektor publik (pemerintah) dan privat (swasta). Hal ini didorong oleh berkembangnya tuntutan lingkungan terhadap akses informasi. Aliran informasi tidak pernah secara total tanpa hambatan, karena manajemen yang tidak transparan dalam mengelola organisasi. Transparansi diterima luas masyarakat, karena transparansi memberikan harapan terhadap efisiensi, membangun kredibilitas dan citra, kepercayaan dan kolaborasi. Transparansi juga sangat penting untuk mencegah terjadinya skandal, penyelewengan dan penyimpangan yang dapat menimbulkan kebangkrutan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Yulian Prabowo, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan way Dadi Baru)". (Skripsi Program Sarjana Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 45

<sup>74</sup> Lufi Aprilia, "Pengaruh Good University Governance Terhadap Kepuasan Mahasiswa (studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang)". (Skripsi Program Sarjana Fakultas FEBI UIN Walisongo, Semarang, 2017), h. 24

Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di bidang manajemen keuangan, transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.<sup>75</sup>

Menurut Mardianto dalam Muhammad Rizqi Syahri Romadhon indikator dari transparansi adalah:

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset.
2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi pada publik.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Good Governance Dalam Islam” (On-line), tersedia di <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id> (27 September 2019)

<sup>76</sup> Muhammad Rizqi Syahri Romadhon, “Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada

## 2. Dasar Hukum Transparansi Menurut Islam

Dalam hubungannya dengan islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah (282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-

*orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada lagi dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 282).*

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat.

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkap oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *prophetic value of business and management* (nilai kenabian, bisnis dan manajemen) yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya:

1. *Shiddiq* (benar), nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnis dan manajemen nya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan, dan emosional.



2. *Amanah*, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. *Fathonah*, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
4. *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai-nilai bisnis dan manajemennya adalah supel, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.<sup>77</sup>

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi.

Sehubung dengan kejujuran, dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 dinyatakan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad syafi'i Antonio, "Probhetic Values Of Business and Management" (Skripsi Program Sarjana UIN Malang, Malang, 2002), h. 196

<sup>78</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 42

Nilai kejujuran (*Shiddiq*), keterbukaan/transparansi kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (*Tabligh*), baik itu secara verbal maupun non-verbal sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami maksud dari si pemberi informasi. Dengan adanya kontribusi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan akan cepat dan tepat dimengerti oleh penggunanya.

Transparansi dalam Islam juga sudah di praktikkan pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin salah satu contohnya adalah pada masa kepemimpinan Umar bin al-Khattab, hal yang dilakukan oleh Umar adalah melakukan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara yang dimana khalifah Umar mendirikan kantor perbendaharaan dan keuangan negara (*Bayt al mal*) yang permanen, dan didalam perekrutan pejabat Umar terkenal sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya, hal ini dilakukan untuk menjauhkan diri dari praktik nepotisme dan main drop-dropaan dari atas untuk menentukan pejabat.<sup>79</sup> Untuk pemerintah di daerah, Umar mengangkat gubernur yang bertugas untuk mengadakan inspeksi ke bagian daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat setempat tentang para pejabat.<sup>80</sup> Hal ini dilakukan untuk menjadi asas keterbukaan kepada semua pihak.

Dalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik). Sebenarnya konsep

---

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.66

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 67

*good governance* yang ada dalam Al-qur'an tidak hanya diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep-konsep dari *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar account (hitung), dalam agama islam setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihitung walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim disebutkan “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Al-Bukhari Muslim).

Dalam kaitannya dengan konsep *good governance* komitmen seorang pemimpin dan juga para pemegang amanah di pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*.

2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi maka masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi menjadi komponen penting, adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah maka akan meminimalisir tingkat korupsi, oleh karena itu transparansi sangat dibutuhkan untuk menciptakan *good governance* (pemerintah yang baik)

3. Keadilan, pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hak setiap individu adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesamaan derajatnya serta kesamaan hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis.<sup>81</sup>

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan didalam tabel dibawah ini:

---

<sup>81</sup> Abdul Basith Ramadhan “Good Governance dalam Islam” (On-line), tersedia di: <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id> (14 November 2019).

Tabel 1  
Penelitian Arista Widiyanti

<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian</b>	<b>Metode/ Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Arista Widiyanti (2017) dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)	Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD di Desa Sumberejo dan Desa Kandung.	Metode Deskriptif Kualitatif	Seluruh kegiatan yang di danai dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada Desa Sumberejo yakni, tahap I dengan porsentase 50% pada tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.228.289.626, tahap II dengan porsentase 50% pada bulan September sebesar Rp. 228.710374. Sedangkan untuk desa Kandung pencairan Tahap I dengan porsentase 50% pada tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.202.400.000, dan tahap ii dengan porsentase 50% pada bulan September Rp.202.400.000.

Sumber: Arista Widiyanti, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Tabel 2  
Penelitian Wenda Damayanti

<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian</b>	<b>Metode/ Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Wenda Damayanti (2018) dengan judul penelitian “	Mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan	Metode Deskriptif Kualitatif	Transparansi pengelolaan ADD di desa Tengiri untuk penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya pencatatan kas yang masuk maupun

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)”	Desa dalam Pengelolaan ADD di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung.		yang keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Namun untuk desa Sumberagung masih ada kekurangan dalam bentuk penerapan transparansi dalam pengelolaan ADD, yaitu belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun yang keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
---	---	--	---

Sumber: Wenda Damayanti, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Tabel 3  
Penelitian I Wayan Irvan M

Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
I Wayan Irvan M (2017) dengan judul penelitian “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran	Mengetahui penerapan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Sidoharjo.	Metode Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan APBDes di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan kecuali mengenai pelaporan, faktor penghambat adalah SDM dan sumber dana, dalam program APBDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga terjadi keterlambatan dalam

Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”			pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa.
---	--	--	--

Sumber: I Wayan Irvan M, Skripsi, Universitas Lampung, 2017

Tabel 4  
Penelitian Hanni Andini

<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian</b>	<b>Metode/ Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Hanni Andini (2018) dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten	Mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sinduharjo.	Metode Deskriptif Kualitatif	Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sinduharjo telah dilaksanakan dimana pemerintahan desa bertanggungjawab kepada masyarakat Desa Sidoharjo, BPD dan Bupati atas pembuatan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa, penerapan prinsip transparansi dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah dengan menerapkan keterbukaan rapat, keterbukaan prosedur, keterbukaan informasi, serta keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat.

Sleman)”			
----------	--	--	--

Sumber: Hanni Andini, Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018.

Tabel 5  
Penelitian Miftahuddin

<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian</b>	<b>Metode/ Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Miftahuddin (2018) dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)	Mengetahui akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Panggungharjo.	Metode Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan keuangan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan dana desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah.

Sumber: Miftahuddin, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Keterangan:

1. **Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arista widyanti.**



Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arista Widyanti yakni sama-sama meneliti transparansi dana desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaanya terletak pada judul terdapat pada kata akuntabilitas, dan peneliti hanya meneliti satu desa saja, sedangkan di penelitian Arista Widyanti meneliti dua desa sekaligus. Peneliti menggunakan Hukum Islam sedangkan peneliti terdahulu tidak menggunakan Hukum Islam.

## **2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Wenda Damayanti.**

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wenda Damayanti adalah sama-sama membahas tentang prinsip transparansi ADD, sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaanya adalah terletak di objek penelitian, peneliti terdahulu menggunakan dua objek sekaligus akan tetapi peneliti hanya menggunakan satu objek saja, dan peneliti tidak membahas tentang akuntabilitas Pemerintahan dalam pengelolaan ADD. Peneliti terdahulu tidak menggunakan Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan Hukum Islam.

## **3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Irvan M**

Persamaan penelitian adalah sama-sama menjelaskan tentang transparansi dan objek penelitian di satu desa (tidak dua desa), sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaanya adalah penelitian I Wayan Irvan M menjelaskan tentang penerapan transparansi pengelolaan APBDes sedangkan peneliti hanya meneliti transparansi dana desa. Peneliti terdahulu tidak menggunakan Hukum Islam tetapi peneliti menggunakan Hukum Islam.

**4. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanni Andini**

Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas tentang prinsip transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, dan objek penelitian hanya satu, sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaanya adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan Hukum Islam, Peneliti tidak membahas prinsip akuntabilitas sedangkan Hanni Andini membahas tentang prinsip akuntabilitas.

**5. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin**

Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas tentang transparansi dana desa, dan objek penelitian hanya satu objek saja. Sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin tidak menggunakan Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan Hukum Islam. Peneliti tidak menggunakan prinsip akuntabilitas sedangkan penelitian terdahulu menggunakan prinsip akuntabilitas.

### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.**

Desa Negeri Ulangan Jaya asal mulanya merupakan kampung Negeri Ulangan dengan status tanah marga yang termasuk di dalam wilayah Merak Batin (Marga Bukuk yang saat ini adalah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Selanjutnya Kampung Negeri Ulangan Jaya masuk dalam wilayah Pemerintahan Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon sampai tahun 2003, terjadi pemekaran desa dan pada tahun 2003 tepatnya pada tanggal 05 Agustus 2003 terbentuklah desa persiapan Negeri Ulangan Jaya dengan Pj. Kepala Desa Negeri Ulangan Jaya adalah Bapak Mukhrim S.E.

Pada tahun 2004 Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan menjadi Desa *definitive* (desa yang diakui). Pada bulan November 2006 dilaksananya pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan Pj. Kepala Desa Sawi Efendi dan pada tanggal 16 Januari 2007 pelantikan Kepala Desa *definitive* (desa yang sudah diakui) Mukhrim, S.E, kemudian pada tahun 2007 terjadi pemekaran Kabupaten maka Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon masuk wilayah Kabupaten Pesawaran. Pada tanggal 22 Februari 2013 Pj. Sawi Efendi/ NIP 19600114 200906 1 003, dan pada tanggal 26 Juli 2013 Bapak Ahmad Rifai Resuan

dilantik sebagai Kepala Desa terpilih hasil Pilkades pada tanggal 23 Juni 2013.

Luas wilayah Desa Negeri Ulangan Jaya  $\pm$  400 Ha. Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Branti dan Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah PTPN VII Rejosari Kecamatan Natar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Penduduk desa Negeri Ulangan Jaya terdiri atas suku Lampung, suku Jawa (Jawa Barat-Jawa Tengah-Jawa Timur), Batak, Palembang, dengan mata pencaharian penduduk terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha/wiraswasta, karyawan, petani/pekebun, buruh serta sopir.

Tabel 6  
Urutan Jabatan Kepala Desa Negeri Ulangan Jaya.

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1	Mukhrim S.E	2003-2004	Pejabat
2	Mukhrim. S.E	2004-2005	Pejabat
3	Mukhrim. S.E	2005-2006	Pejabat

4	Sawi Efendi	2006-2007	Pejabat
5	Mukhrim. S.E	2007-2013	Pejabat
6	Sawi Efendi	Februari 2013-Juli 2013	Pejabat
7	Ahmad Rifai resuan	Juli 2013- Juni 2019	Pejabat
8	Ehwan Muslim S.IP	2 Juli- Sekarang	Penjabat

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019

Tabel 7  
Urutan Jabatan Sekretaris (SEKDES) Desa Negeri Ulangan Jaya

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1	Agustari	2003-2004	Non PNS
2	Sawi Efendi	2004-2010	Non PNS
3	Sawi Efendi	Juni 2009-Januari 2019	PNS
4	Tri Suratno	Januari-Juli 2019	Non PNS
5	Wahono	Agustus- Sekarang	Non PNS

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019

Tabel 8  
Urutan Jabatan Kasi-Kaur Desa Negeri Ulangan Jaya

No	Nama	Jabatan
1	Sri Utami	Kepala Seksi Pemerintahan
2	Sri Afrida	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
3	Okta Lestari	Kepala Seksi Pelayanan
4	Siti Marningsih	Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum
5	Afrizal	Kepala Urusan Keuangan

6	Kristina Damayanti	Kepala Urusan Perencanaan
---	--------------------	---------------------------

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019

Tabel 9  
Urutan Jabatan Kepala Dusun Desa Negeri Ulangan Jaya

No	Nama	Jabatan
1	Solihin	Kepala Dusun Negeri Ulangan
2	Rosyid	Kepala Dusun Bumi Jaya
3	Patah Mansyur	Kepala Dusun Negeri Baru
4	Kuswanto	Kepala Dusun Way Ratai

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019

## **B. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.**

### **1. Letak dan Luas Wilayah**

Desa Negeri Ulangan Jaya merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang terletak kurang lebih 15km kearah Timur Kecamatan Negeri Katon dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan Desa Haduyang Kecamatan Natar
- Timur : Berbatasan dengan Desa Branti Raya dan Desa Candimas
- Selatan : Berbatasan dengan PTPN VII Rejosari Natar
- Barat : Berbatasan dengan Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Desa Negeri Ulangan Jaya mempunyai luas wilayah  $\pm$  400 Ha. Iklim Desa Negeri Ulangan Jaya sebagaimana desa-desa di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Negeri Ulangan Jaya. Jumlah bulan hujan rata-rata 7 bulan/tahun dan suhu rata-rata 30-32°C.

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Negeri Ulangan Jaya pada bulan Januari 2019 mempunyai penduduk sejumlah 2.208 jiwa. Jumlah laki-laki adalah 1.123 jiwa dan perempuan adalah sejumlah 1.085 jiwa dan dengan jumlah KK 560 yang tersebar di 4 wilayah dusun.

## 3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Desa Negeri Ulangan Jaya sebagai berikut:

Tabel 10  
Tabel Tingkat Pendidikan Desa Negeri Ulangan Jaya.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Jumlah penduduk Pra sekolah	307
2	Jumlah penduduk usia SD	341
3	Jumlah penduduk usia SLTP	152
4	Jumlah penduduk usia SLTA	165
5	Jumlah penduduk tamat SD	540
6	Jumlah penduduk tamat SLTP	412

7	Jumlah penduduk tamat SLTA	243
8	Jumlah penduduk tamat D-3	9
9	Jumlah penduduk tamat S-1	37
10	Jumlah penduduk tamat S-2	2

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019

#### 4. Keadaan Ekonomi Desa

Desa Negeri Ulangan Jaya adalah penduduknya selain petani ada juga sebagai buruh, karyawan dan lain sebagainya dengan table sebagai berikut:

Tabel 11  
Tabel Mata Pencaharian Penduduk/pekerja Desa Negeri Ulangan Jaya.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	750
2	Buruh Tani	325
3	Pegawai Negeri Sipil	28
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	2
5	Pedagang Keliling	8
6	Peternak Ayam	4
7	Perikanan	5
8	Pembantu Rumah Tangga	3
9	POLRI	2
10	Pensiunan	10
11	Pengusaha Kecil dan Menengah	14
12	Karyawan Perusahaan Swasta	70



13	Karyawan Pemerintahan	35
14	TNI	1

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019.

## 5. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Negeri Ulangan Jaya sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian/perkebunan, seperti perkebunan kakao, kelapa, karet, perumahan dan sebagian untuk persawahan serta palawija.

Tabel 12  
Tabel Pola Penggunaan Tana Desa Negeri Ulangan Jaya.

No	Jenis Lahan/Tanah	Jumlah
1	Tanah Pemukiman	25 Ha
2	Tanah Persawahan	25 Ha
3	Tanah Kuburan	1 Ha
4	Tanah Pekarangan	20 Ha
5	Tanah Tegalan/Ladang	71 Ha
6	Tanah Perkebunan Rakyat	150 Ha
7	Tanah Perkebunan Perorangan	70 Ha
8	Tanah Sekolahan	4 Ha
9	Tanah Keguaan Lain Lain	44 Ha
	<b>Jumlah</b>	<b>410 Ha</b>

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019

## 6. Pemilik Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Negeri Ulangan Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 13  
Tabel Kepemilikan Hewan ternak Desa Negeri Ulangan Jaya

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah	Keterangan
1	Ayam	30.000 Ekor	
2	Sapi	484 Ekor	89 KK
3	Kerbau		
4	Kambing	100 Ekor	
5	Bebek	120 Ekor	

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019.

## 7. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Negeri Ulangan jaya secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 14  
Tabel Sarana Prasarana Desa Negeri Ulangan Jaya.

No	Prasarana Desa	Jumlah
1	Jalan-Jalan Makadam	6,5 km
2	Jalan-Jalan Tanah	2 km
3	Jalan Aspal/Hotmix	3 km
4	Balai Desa	1 Unit
5	Sekolah SD	1 Unit
6	Sekolah Madrasah (MIN 2	1 Unit

	Pesawaran)	
7	Sekolah SLTP Swasta	1 Unit
8	Sekolah SLTP N Satap 10 Pesawaran	1 Unit
9	Masjid	3 Unit
10	Musholla	3 Unit
11	Gereja	1 Unit
12	PAUD	1 Unit

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019.

#### 8. Kondisi Pemerintahan

Wilayah pemerintahan Desa Negeri Ulangan Jaya dibagi menjadi 4 Dusun dan 10 RT.

Tabel 15  
Tabel Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Negeri Ulangan Jaya.

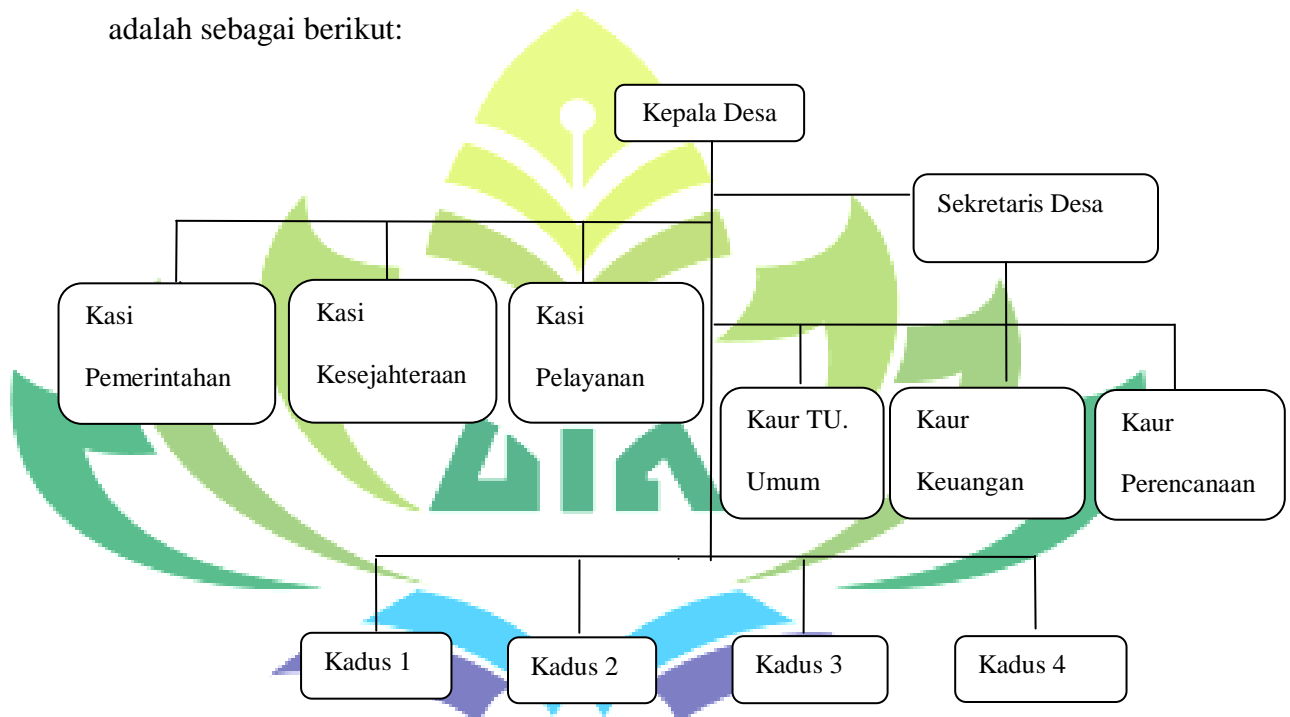
No	Nama RW/ Dusun	Jumlah
1	Dusun Negeri Ulangan Jaya	2 RT
2	Dusun Bumi Jaya	2 RT
3	Dusun Negeri Baru	2 RT
4	Dusun Way Ratay	4 RT
	<b>Jumlah</b>	<b>10 RT</b>

Sumber: Profil Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019.

#### C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Susunan organisasi pemerintahan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Susunan

organisasi pemerintahan desa tersebut diatas dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah kabupaten, yang mana peraturan tersebut memuat materi antara lain mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja.<sup>82</sup> Adapun struktur organisasi pemerintahan di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:



Gambar I  
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan  
Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

Keterangan Personalia Pemerintah Desa:

1. Kepala Desa

: Ehwan Muslim S.IP

<sup>82</sup> Khairuddin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aneka Printing Metro, 2004), h. 35

- 
2. Sekretaris Desa : Wahono
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Siti Marningsih
4. Kepala Urusan Keuangan : Afrizal
5. Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan : Cristina Damayanti
6. Kepala sesi pelayanan : Okta Lestari
7. Kepala sesi kesejahteraan sosial : Sri Afrida
8. Kepala sesi pemerintahan : Sri Utami
9. Kepala dusun Negeri Ulangan : Solihin
10. Kepala dusun Bumi Jaya : Rosyid
11. Kepala dusun Negeri Baru : Patah Mansyur
12. Kepala dusun Waya Ratay : Kuswanto

**D. Pengelolaan Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan terdapat di Bab II (Asas Pengelolaan Keuangan Desa) Pasal 2, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun 2019 yaitu berjumlah 1.303.276.564 yang terdiri dari pendapatan asli desa, dana

desa, pajak bagi hasil, alokasi dana desa, penerimaan bantuan keuangan dan lain-lain. Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

*“Untuk jumlah APBDes yang diperoleh adalah Rp.1.303.276.564 yang dimana terdiri dari pendapatan asli desa, dana desa, pajak bagi hasil, alokasi dana desa, penerimaan bantuan keuangan dan lain-lain”<sup>83</sup>.*

Untuk pembagian APBDes nya didasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 16  
APBDes Desa Negeri Ulangan Jaya tahun 2019

No	Pembagian	Jumlah
1	Pendapatan asli desa	Rp. 2.000.000
2	Dana desa	Rp. 840.378.000
3	Pajak bagi hasil	Rp. 22.672.513
4	Alokasi dana desa	Rp. 409.443.799
5	Penerimaan bantuan keuangan	Rp. 911.000
6	Dan lain-lain	Rp. 27.871.252
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.303.276.564</b>

Sumber: APBDes Desa Negeri Ulangan Jaya, 2019.

Keterangan:

- a. Pendapatan asli desa itu diperoleh dari bagi hasil badan usaha milik desa (BUMDes). Sebagaimana pendapat narasumber dibawah ini:

---

<sup>83</sup> Ehwan Muslim, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

*“jadi Desa Negeri Ulangan Jaya mempunyai usaha dan usahanya dijalankan orang lain (bukan aparat desa) kemudian keuntungan nya dibagi ke desa. BUMDes yang ada di Desa Negeri Ulangan Jaya untuk saat ini hanya ada satu yaitu unit pinjaman modal”.*<sup>84</sup>

- b. Dana desa merupakan suatu dana yang berasal dari pemerintah pusat dan diberikan untuk Desa Negeri Ulangan Jaya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

*“Dana desa itu kan dana yang berasal dari pemerintah pusat, untuk jumlah dari dana desa itu sendiri adalah Rp. 804.378.000, dan dialokasikan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan”*<sup>85</sup>

- c. Pajak bagi hasil diperoleh dari pajak yang berasal dari rumah masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

*“Jadi setiap rumah dibebankan untuk membayar pajak kemudian dari hasil pajak itu diserahkan ke Pemerintahan Daerah kabupaten Pesawaran, dan kemudian pihak Pemda memberikan pajak bagi hasil ke Desa Negeri Ulangan Jaya”*<sup>86</sup>

- d. Alokasi dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

---

<sup>84</sup> Wahono, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

<sup>85</sup> Afrizal, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

<sup>86</sup> M. Nasikin, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

- e. Penerimaan bantuan keuangan merupakan suatu bantuan yang berasal dari Kabupaten dan diperuntukkan untuk desa khususnya Desa Negeri Ulangan Jaya.
- f. Dan lain lain disini maksudnya adalah koreksi sisa anggaran. Hal ini tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

*“Jadi nanti tiap tahun dana desa itu diperiksa, dan jika ada kelebihan dana maka dana itu dikembalikan dan dialokasikan untuk tahun depan. Tetapi jika didalam perencanaan yang sudah direncanakan dana sekian tetapi didalam pengelolaanya kurang maka bisa jadi point dan lain-lain disini jumlah nominalnya adalah nol (kosong)”<sup>87</sup>*

## **2. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun 2019 berjumlah Rp.1.303.276.564 dan kemudian di alokasikan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan : Rp. 435.027.312
2. Pelaksanaan pembangunan desa : Rp. 756.661.000
3. Pembinaan kemasyarakatan : Rp. 80.678.252
4. Pemberdayaan masyarakat : Rp. 30.910.000

---

<sup>87</sup> Idir, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diterima oleh Desa Negeri Ulangan Jaya pada tahun 2019 yang berjumlah Rp.1.303.276.564 itu kemudian dialokasikan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintah berjumlah Rp. 435.027.321 kemudian dialokasikan untuk, penghasilan tetap kepala desa beserta tunjangan selama satu tahun Rp. 28.700.000. Penghasilan tetap perangkat desa (1 orang sekretaris desa, 3 orang kasi, 3 orang kaur dan 4 orang kepala dusun) beserta tunjangan selama satu tahun Rp. 147.600.000. Belanja barang perlengkapan kantor Rp. 78.443.799. Honor tim pelaksana PKPKD dan PPKD Rp. 21.900.000. Honor operator Rp.24.000.000. Honor petugas kebersihan Rp. 6.000.000. Pengadaan seragam Rp.10.500.000. Langganan air Rp. 720.000. Langganan internet Rp 6.000.000. Iuran APBDESI Rp.3.000.000. Tunjangan BPD Rp.33.000.000. Belanja barang perlengkapan kantor Rp.4.010.000. Intensif RT 10 orang Rp.60.000.000. Perlengkapan APBDes Rp.6.921.000. Penyusunan APBDes perubahan Rp.573.000. Penyusunan SPJ 3 tahap Rp. 4.373.000. Honorarium dan uang lembur Rp. 41.894.000. Pembelian ATK Rp. 3.197.000. Dokumentasi dan publikasi Rp.500.000. Persiapan pelaksanaan belanja barang perlengkapan Rp.500.000. Seragam panitia Rp.2.200.000.

Perlengkapan jasa sewa (sound system, dekorasi, tenda, kursi)  
Rp.6.300.000. Pengamanan (belanja jasa honorium) Rp.1.250.000.  
Perlengkapan dinas Rp.1.050.000. Konsumsi Rp.9.725.000.

2. Pelaksanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan berjumlah Rp.756.661.000 kemudian  
dialokasikan untuk operasional PAUD Rp.7.800.000. Operasional  
TPA Rp.1.800.000. Operasional posyandu Rp.11.625.000.  
Pembangunan paving block (2.5x168m) Rp. 131.894.000.  
Pembangunan paving block (2x219 m) Rp.68.169.000.  
Pembangunan GSG (Gedung Serba Guna) Rp.604.992.000. Poster/  
Baliho APBDes 2019 Rp.350.000.

3. Pembinaan kemasyarakatan.

Pembinaan kemasyarakatan berjumlah Rp. 80.678.252 kemudian  
dialokasikan untuk insentif linmas Rp.12.000.000. Peringatan  
HUT RI Rp.33.191.000. Pengajian himpunan majelis taklim  
(PHMT) Rp.20.865.000. Pemeliharaan rumah ibadah (masjid)  
Rp.1.800.000. Kegiatan karang taruna Rp. 12.500.000. Belanja  
barang perlengkapan Rp.4.041.000.

4. Pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp.30.910.000 kemudian  
dialokasikan untuk studi banding sekretaris desa Rp.7.000.000.  
Pemeliharaan peningkatan kapasitas aparatur desa Rp.2.000.000.

Pelatihan ketua dan anggota BPD Rp.5.900.000. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes Rp.1.000.000. Penanganan stunting 38 orang Rp.18.010.000.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

*“Bentuk dari penyelenggaraan pemerintah itu sendiri seperti gaji perangkat desa, biaya operasional. Bentuk dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri adalah pembuatan gedung serba guna di Desa Negeri Ulangan Jaya. Bentuk dari pembinaan kemsyarakatan yakni pembinaan karang taruna, pelatihan kesehatan, pelatihan keterampilan PKK dan pelatihan posyandu, Bentuk dari pemberdayaan masyarakat yaitu digunakan untuk kegiatan yang sifatnya umum untuk masyarakat seperti penanganan stunting, balita diberikan telur per tiga bulan sekali”.*<sup>88</sup>

Dana desa yang turun berjumlah milyaran tersebut tidak serta merta langsung turun semua melainkan bertahap dan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap I,II,III. Pencairan dana desa tahap I itu diberikan pada bulan April dengan persentase 20% yaitu sekitar Rp. 168.075.600, dan tahap II diberikan pada bulan Juli dengan persentase 40% yaitu Rp. 336.151.200, dan tahap III diberikan pada bulan November dengan

---

<sup>88</sup> Ehwan Muslim, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

persentasi 40% yaitu sekitar Rp. 336.151.200 dan total dari tiga tahap itu adalah Rp. 840.378.000.

Alokasi Dana Desa yang turun di Desa Negeri Ulangan Jaya juga sama tidak serta merta langsung turun melainkan dibagi menjadi empat tahapan, dengan persentase 25% per tahapannya yaitu terjadi pada bulan Desember, April, Juni, dan Oktober. Pada bulan Desember dengan persentase 25% yaitu sekitar Rp.102.360.949, bulan April juga 25% yaitu Rp.102.360.949, bulan Juni 25% yaitu Rp.102.360.949, bulan Oktober 25% yaitu Rp.102.360.949 dengan jumlah total empat tahap tersebut adalah Rp.409.443.799. Kemudian untuk pendapatan asli desa, pajak bagi hasil, penerimaan bantuan keuangan dan lain-lain itu hanya turun satu kali dalam satu tahun. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

*“Untuk dana desa itu sendiri turun tiga kali terbagi menjadi tiga tahap, untuk alokasi dana desa nya cair dalam satu tahun empat kali, kemudian untuk pendapatan asli desa, pajak bagi hasil, penerimaan bantuan keuangan dan lain-lain dalam satu tahun nya hanya satu kali cair”.*<sup>89</sup>

Dana desa yang jumlah milyaran tersebut harus dikelola secara baik dan menggunakan prinsip transparan. Pasalnya jika dana desa yang digunakan tidak berdasarkan prinsip transparan maka akan menimbulkan

---

<sup>89</sup> Afrizal, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

suatu bencana. Jadi dana desa yang cair itu sepatutnya masyarakat harus mengetahui.

Dana desa yang turun di Desa Negeri Ulangan Jaya sebelum akan dialokasikan untuk apa saja dana tersebut, tahap pertama yang dimulai yaitu tahap perencanaan. Didalam tahap perencanaan itu sendiri yang paling pertama adalah mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk melalui musyawarah dusun, kemudian dimusyawarah rencana dan pembangunan yang dimana tujuan nya adalah untuk menyaring aspirasi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber dibawah ini:

*“Untuk perencanaan terkait dana desa itu sendiri pertama di musyawarahkan yang dinamakan dengan musyawarah dusun (musdus) dengan tujuan untuk menyaring aspirasi masyarakat, tetapi jika dana nya tiak cukup maka kita laksanakan rencana itu secara bertahap.”<sup>90</sup>*

*“Untuk perencanaan nya sendiri dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat, inspektorat, para tokoh adat, dan perangkat desa.”<sup>91</sup>*

*“Untuk perencanaan terkait dana desa sih di musyawarahkan terlebih dahulu, dari itu musyawarah dusun, musyawarah rencana dan pembangunan (musrenbang) untuk menyaring aspirasi dari masyarakat itu sendiri”.<sup>92</sup>*

---

<sup>90</sup> Risnawati, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan jaya, 18 Oktober 2019.

<sup>91</sup> Sahril, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 18 Oktober 2019.

<sup>92</sup> Sunardi, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 18 Oktober 2019.

### 3. Partisipasi Masyarakat di Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Didalam pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya masyarakat sangat berpartisipasi, sebagaimana kita ketahui di tahun 2019 ini sedang melakukan pembangunan pembuatan GSG, yang dimana semua pekerja nya diambil dari pekerja desa setempat bukan pekerja yang berasal dari luar desa, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap warga masyarakatnya untuk memajukan perekonomian. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber:

*“Masyarakat sangat berpartisipasi didalam pengelolaan dana desa, bentuk dari partisipasi masyarakat nya adalah seperti sekarang sedang melakukan pembuatan GSG yang dimana pekerjanya berasal dari masyarakat Desa Negeri Ulangan Jaya”<sup>93</sup>*

*“Masyarakat sangat berpartisipasi kok didalam pengelolaan dana desa, saat ini masih pembuatan GSG pekerja nya berasal dari dalam desa, didalam pembangunan desa masyarakat juga ikut bergotong royong”<sup>94</sup>*

### 4. Transparansi Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Transparansi merupakan suatu hal yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi.

---

<sup>93</sup> Sutikno, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 18 Oktober 2019.

<sup>94</sup> Yunita, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 18 Oktober 2019.

Didalam pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya yakni dilakukan secara transparan, bentuk dari transparan itu sendiri adalah ketika dana desa itu turun dari Pemerintah Pusat kemudian di musyawarahkan dengan perangkat desa dan warga masyarakat, berapa jumlahnya dan akan dialokasikan untuk apa saja, jadi didalam pengelolaan dana desa itu disepakati oleh aparat desa dan masyarakat, jadi tidak serta merta desa mengambil keputusan secara sepihak, bentuk dari transparansi terkait dana desa selanjutnya adalah dengan adanya plang APBDes di depan Balai Desa Negeri Ulangan Jaya, jadi berapa dana yang masuk ke desa dan dialokasikan untuk apa saja masyarakat mengetahui. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

Didalam perencanaan pembangunan di Desa Negeri Ulangan Jaya juga masyarakatnya berpartisipasi, bentuk dari partisipasi masyarakatnya dimulai dari membantu bergotong royong, didalam pembangunan juga semua pekerja diambil dari Desa Negeri Ulangan Jaya, bukan dari pekerja luar desa. Masyarakat turut dilibatkan menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan, yang merupakan penanggungjawab utama pelaksanaan program kerja pemerintah desa.

Selain dari adanya plang APBDes di depan balai desa, di Desa Negeri Ulangan Jaya juga terdapat laporan pertanggungjawaban berupa tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat (dalam hal ini suara dan usulan

rakyat di salurkan melalui BPD), terdapat sistem pemberian informasi pada publik melalui web desa, facebook desa.

Selain wawancara dengan sepuluh orang di balai Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian untuk mengambil data berupa transparansi dana desa hal yang dilakukan peneliti adalah dengan cara pengumpulan data kuisioner yang bersifat tertutup, yang artinya peneliti membuat pertanyaan dan pilihan jawaban, dan kemudian pihak responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Jumlah keseluruhan responden yang diberikan kuisioner adalah 47 orang yang terdiri dari 38 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Adapun hasil penelitian tentang tanggapan responden terhadap Transparansi Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang terdiri dari pertanyaan: Apakah anda mengetahui bahwa Desa Negeri Ulangan Jaya menerima dana desa yang berasal dari pemerintah pusat (butir 1.1). Menurut anda apakah pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan adil (butir 1.2). Apakah masyarakat ikut berpartisipasi didalam pengelolaan dana desa (butir 1.3). Apakah didalam perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat (butir 1.4) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 16  
Pengumpulan Data Responden Menggunakan Kuisisioner

No	Pertanyaan	Jawaban		Total
		Ya	Tidak	
1	Butir 1.1	95,74%	4,26%	100%
2	Butir 1.2	93,61%	6,39%	100%
3	Butir 1.3	93,61%	6,39%	100%
4	Butir 1.4	100%	0%	100%

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa tanggapan responden untuk butir 1 masyarakat mengetahui bahwa Desa Negeri Ulangan Jaya menerima dana desa yang berasal dari pemerintah pusat hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yaitu 95,74% sedangkan yang tidak mengetahui hanya 4,26%. Dan untuk butir 2, masyarakat menjawab didalam pengelolaan transparansi dana desa sudah dilakukan secara transparan dan adil dengan persentase 93,61% sedangkan yang menjawab tidak transparan hanya 6.39% itu artinya didalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparan dan adil. Untuk butir 3 masyarakat ikut berpartisipasi didalam pengelolaan dana desa, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yaitu 93,61% sedangkan yang menjawab tidak ikut berpartisipasi hanya 6,39% itu artinya masyarakat berpartisipasi didalam pengelolaan dana desa. Dan untuk butir 4 didalam perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari

jumlah jawaban responden yaitu 100%, itu artinya didalam perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat dalam hal ini khususnya adalah masyarakat Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Walaupun sebagian banyak masyarakat mengatakan transparansi terhadap pengelolaan dana desa tetapi ada segelintir orang masyarakat yang mengatakan tidak transparan, yang menjadi alasan mereka mengungkapkan seperti itu adalah dikarenakan mereka tidak mengetahui berapa dana yang turun dari pemerintah kemudian di alokasikan untuk apa saja, bahkan jalan di depan rumah mereka belum aspal tetapi masih bebatuan, hal ini yang menimbulkan kecemburuan sosial sehingga mengakibatkan mereka tidak pro dengan kepemimpinan kepala desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, hal itulah yang membuat mereka mengatakan bahwa didalam pengelolaan dana desa dijalankan tidak transparan.

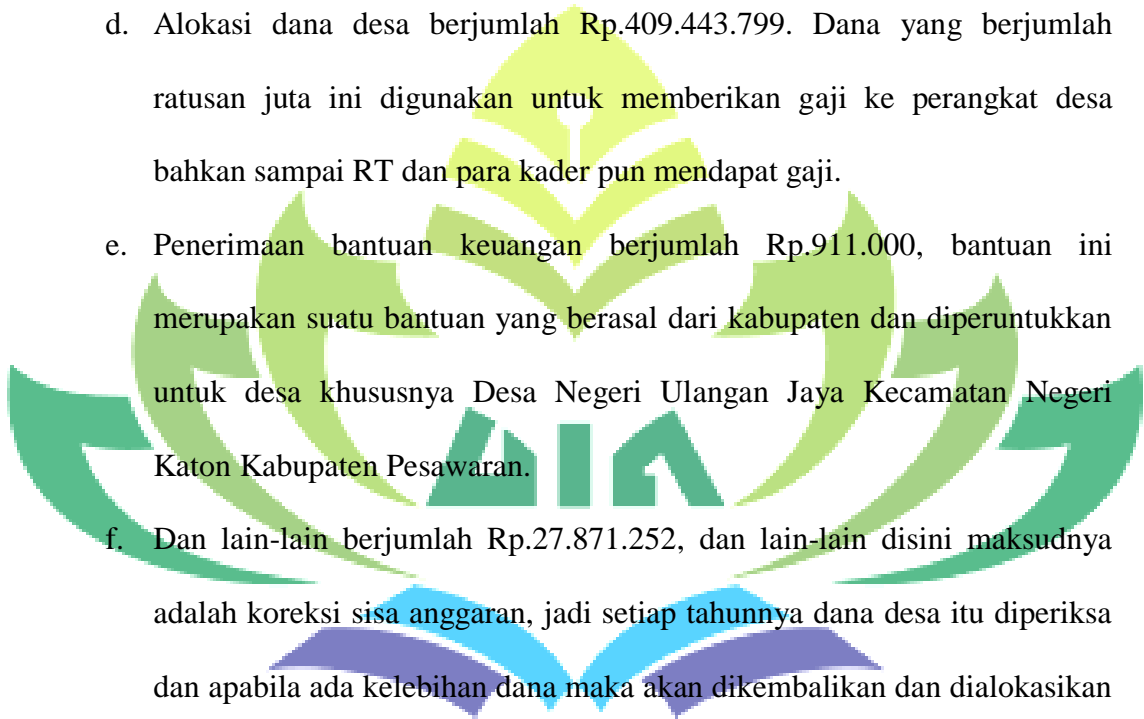
## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Transparansi Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan tentang Transparansi Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya sudah dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan mencerminkan prinsip-prinsip transparansi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diterima oleh Desa Negeri Ulangan Jaya tahun 2019 berjumlah Rp. 1.303.276.564 dan itu didapat dari:

- a. pendapatan asli desa yang berjumlah Rp.2.000.000, pendapatan hasil desa ini diperoleh dari bagi hasil badan usaha milik desa (BUMDes), BUMDes di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran hanya ada satu yaitu unit pinjaman modal, jadi desa mempunyai usaha dan usahanya dijalankan oleh orang lain (bukan aparat desa) kemudian keuntungannya dibagi ke desa.
- b. dana desa berjumlah Rp.840.378.000, dana desa yang berasal dari pemerintah pusat kemudian di alokasikan untuk pembangunan, pembinaan masyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

- 
- c. pajak bagi hasil berjumlah Rp.22.672.513, diperoleh dari pajak yang berasal dari rumah masyarakat, jadi setiap rumah dibebankan untuk membayar pajak kemudian dari hasil pajak itu diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan kemudian pihak Pemda memberikan pajak bagi hasil ke Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- d. Alokasi dana desa berjumlah Rp.409.443.799. Dana yang berjumlah ratusan juta ini digunakan untuk memberikan gaji ke perangkat desa bahkan sampai RT dan para kader pun mendapat gaji.
- e. Penerimaan bantuan keuangan berjumlah Rp.911.000, bantuan ini merupakan suatu bantuan yang berasal dari kabupaten dan diperuntukkan untuk desa khususnya Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- f. Dan lain-lain berjumlah Rp.27.871.252, dan lain-lain disini maksudnya adalah koreksi sisa anggaran, jadi setiap tahunnya dana desa itu diperiksa dan apabila ada kelebihan dana maka akan dikembalikan dan dialokasikan untuk tahun depan, tetapi jika didalam perencanaan yang sudah direncanakan dana nya dan kemudian didalam pengelolaanya kurang maka bisa saja point dan lain-lain jumlah nominalnya menjadi nol (kosong).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu kemudian dialokasikan untuk:

1. penyelenggaraan pemerintah yang berjumlah Rp.435.027.312

Bentuk dari penyelenggaraan pemerintah itu sendiri seperti gaji perangkat desa, biaya operasional.

2. Pelaksanaan pembangunan desa yang berjumlah Rp.756.661.000

Bentuk dari pelaksanaan pembangunan desa itu seperti pembuatan gedung serba guna (GSG) di Desa Negeri Ulangan Jaya kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, operasional PAUD, TPA, posyandu, pembangunan paving block, dan poster/ baliho APBDes 2019.

3. Pembinaan kemasyarakatan yaitu berjumlah Rp.80.678.252

Bentuk dari pembinaan kemasyarakatan adalah insentif linmas, peringatan HUT RI, pengajian himpunan majelis taklim, pemeliharaan rumah ibadah (masjid), kegiatan karang taruna, belanja barang perlengkapan.

4. Dan pemberdayaan masyarakat berjumlah Rp.30.910.000

Bentuk dari pemberdayaan masyarakat itu digunakan untuk kegiatan yang sifatnya umum di masyarakat, seperti studi banding sekretaris desa, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes, pelatihan ketua dan anggota BPD, penanganan stunting 38 orang.

Dana desa merupakan suatu dana yang berasal dari pemerintah pusat dan diberikan untuk Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dana desa yang diterima berjumlah Rp.804.378.000 dan di alokasikan untuk pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di Desa Negeri Ulangan Jaya pada tahun ini adalah pembuatan GSG, sedangkan pembinaan

masyarakat digunakan untuk pembinaan karang taruna, dan bentuk dari pemberdayaan masyarakat yaitu digunakan untuk pelatihan keterampilan PKK, pelatihan aparat desa.

Dana desa yang turun berjumlah milyaran tersebut tidak serta merta turun langsung melainkan bertahap, dalam satu tahun nya turun selama tiga kali tahap, tahap I terjadi pada bulan April dengan persentase 20% yaitu sekitar Rp.168.075.000, tahap II diberikan pada bulan Juli dengan persentase 40% yaitu berjumlah Rp.336.151.200, dan tahap III diberikan pada bulan November dengan persentase 40% yaitu berjumlah Rp.336.151.200. Indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset.
2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh kepala desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota.
4. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan keuangan desa terdapat di Pasal 2 yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Transparansi yang artinya bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas yang artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yang artinya mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparat desa (kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, badan permusyawaratan desa) dan kuisioner yang telah dibagikan dengan sejumlah masyarakat, pengelolaan dana desa sudah dikelola secara transparan, hal itu bisa dilihat dari macam-macam indikator diatas yang mencerminkan prinsip transparan, dan apabila melihat indikator atau takaran dari asas transparan terhadap pengelolaan dana desa maka Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sudah memenuhi asas-asas dari indikator atau takaran prinsip transparansi diatas.

Pasalnya dana desa yang turun dari Pemerintah Pusat kemudian di musyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat, para tokoh, perangkat desa, inspektorat. Di depan balai desa juga sudah ada plang APBDes berapa nominal nya dan digunakan untuk apa saja, tersedianya laporan mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangan, tersedianya laporan

pertanggungjawaban yang disebut dengan SPJ (surat pertanggung jawaban), tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat (disalurkan melalui BPD) dan terdapat sistem pemberian informasi pada publik (melalui web desa, facebook desa). Didalam perencanaan pembangunan juga melibatkan masyarakat, yang dimana diadakan musyawarah terlebih dahulu dan didalam proses pembangunan juga melibatkan masyarakat, bentuk dari pelibatan itu sendiri adalah untuk saat ini Desa Negeri Ulangan Jaya sedang melakukan pembangunan pembuatan GSG yang dimana semua pekerja nya diambil dari dalam desa bukan pekerja dari luar desa hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian aparat desa dengan masyarakat setempat yang dimana tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan untuk memajukan perekonomian masyarakat. Didalam program pemerintah masyarakat juga ikut berpartisipasi bentuk dari partisipasi masyarakat adalah membantu pihak desa seperti gotong royong.

#### **B. Transparansi Dana Desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Perspektif Hukum Islam.**

Pada dasarnya Transparansi merupakan sifat tembus pandang atau kejernihan. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi yang terkait, artinya transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan.

Di bidang manajemen keuangan, transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan



pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Dalam hubungannya dengan islam, konsep transparansi (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (282):

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mengdiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mengditekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada lagi dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 282).*

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh Muhammad Syafi'i

Antonio bahwa *prophetic volue of business and management* yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya:

1. *Shiddiq* (benar), nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional.
2. *Amanah*, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. *Fathonah*, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
4. *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif, nilai bisnis dan manajemennya adalah supel, deskripsi tegas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.

Transparansi atau keterbukaan dalam Islam juga sudah di praktikkan pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin salah satu contohnya adalah pada masa kepemimpinan Umar bin al-Khattab, hal yang dilakukan oleh Umar adalah melakukan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara yang dimana khalifah Umar mendirikan kantor perbendaharaan dan keuangan negara (*Bayt al mal*) yang permanen, dan didalam pengrekrutan pejabat Umar terkenal sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya, hal ini dilakukan untuk menjauhkan diri dari praktik nepotisme dan

main drop-dropaan dari atas untuk menentukan pejabat. Untuk pemerintah di daerah, Umar mengangkat gubernur yang bertugas untuk mengadakan inspeksi ke bagian daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat setempat tentang para pejabat. Hal ini dilakukan untuk menjadi asas keterbukaan kepada semua pihak.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Sehubung dengan kejujuran, dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 dinyatakan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, transparansi pada hakikatnya akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi

dan kepentingan masyarakat, karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat. Didalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik) yaitu konsep-konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban). Kata akuntabilitas berasal dari kata account (hitung). Dalam agama Islam setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dihitung walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak.
2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dengan adanya transparansi maka masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang dicanangkan. Transparansi menjadi komponen penting karena untuk meminimalisir tingkat korupsi, oleh karena itu transparansi sangat dibutuhkan untuk menciptakan *good governance*.
3. Keadilan, merupakan pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil, keadilan mengacu pada keadilan sosial yaitu pemerintah yang menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang, sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis.

Pada dasarnya, kinerja Kepala Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran didalam pengelolaan dana desa sudah dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan keuangan desa, yang dimana dana desa dikelola berdasarkan asas transparan, dana desa yang turun dari Pemerintah Pusat kemudian di umumkan ke warga masyarakat dan di Desa Negeri Ulangan Jaya juga sudah ada plang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan apabila dana desa itu akan digunakan maka dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga masyarakat desa, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan serta tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi pada publik.

Didalam pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya juga sudah sesuai dengan prinsip hukum islam karena didalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik), dan terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban), kata akuntabilitas berasal dari kata account (hitung) didalam agama Islam setiap perbuatan yang dilakukan didunia akan dihitung. Berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, di Desa Negeri Ulangan Jaya menerapkan prinsip akuntabilitas, hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Didalam pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya terdapat laporan pertanggungjawaban, yang artinya didalam pengelolaan dana desa nya terdapat pembukuan yang jelas.

2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, transparansi menjadi komponen penting karena untuk menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik). Berkaitan dengan prinsip transparansi menurut islam, sudah jelas jika Desa Negeri Ulangan Jaya menerapkan prinsip transparansi, hal ini bisa dilihat dari adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset, terdapatnya plang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di depan Balai Desa Negeri Ulangan Jaya, hal ini merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa terhadap warga masyarakat desa untuk mencerminkan prinsip transparansi (keterbukaan).

3. Keadilan, pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Bentuk dari penerapan konsep keadilan di Desa Negeri Ulangan Jaya adalah tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat, dalam hal ini BPD memiliki wewenang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD diambil dari 4 dusun yang tersebar di Desa Negeri Ulangan Jaya, yang artinya pemerintah desa tidak

mengambil anggota BPD dari dusun tertentu saja. Selain itu, didalam pembuatan gedung GSG yang sekarang sedang dilakukan proses pembangunan, pemerintah desa mengambil pekerjanya bukan dari dusun tertentu saja, melainkan diambil dari semua dusun yang tersebar di Desa Negeri Ulangan Jaya hal ini dilakukan pemerintah desa untuk menghindari sikap kecemburuan sosial antar warga masyarakat desa khususnya di Desa Negeri Ulangan Jaya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, hasil penelitian tentang Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya sudah berjalan sesuai dengan prinsip transparan, hal ini dapat dilihat dari sikap perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa yang transparan didalam pengelolaanya, terdapat plang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan didalam penggunaan dana desa juga selalu di musyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat, terdapat laporan mengenai pertanggungjawaban SPJ (surat pertanggung jawaban) yang tepat waktu, terdapat sarana untuk suara dan usulan rakyat (dalam hal ini suara di usulkan melalui Badan Permusyawaratan Desa) serta terdapat sistem pemberian informasi pada publik (bisa di akses melalui web desa, facebook desa).
2. Perspektif Hukum Islam terhadap transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam, karena konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat



profetik nabi Muhammad SAW, diantaranya siddiq, amanah, fathonah, dan tabligh. Dari sifat *Shiddiq* ini berupa kejujuran, hal ini dibuktikan dengan adanya plang APBDes di depan balai desa. Sifat *Amanah* ini berupa tanggung jawab, hal ini dibuktikan dengan adanya SPJ (surat pertanggung jawaban) yang tepat waktu didalam pengelolaan dana desa. Sifat *Fathonah* ialah pemimpin yang cerdas dan memiliki visi serta sifat *Tabligh* adalah komunikatif, dalam hal ini kepala desa di Desa Negeri Ulangan Jaya merupakan orang yang komunikatif dan mampu melakukan kerja sama tim yang baik.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut rekomendasi yang dapat penulis berikan:

1. Diharapkan kepada Pemerintah desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang masih ada.
2. Diharapkan untuk Pemerintah desa untuk menyediakan kotak saran di depan balai desa agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kapanpun dan tanpa melalui perantara BPD.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan

gambaran spesifik mengenai program-program yang terealisasi di desa.

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan prinsip transparansi pemerintah desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Ali Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ketiga, 2011.

Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cetakan kedua, 1993.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

AS Susiadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung, 2015.

Bahreisy Said. Bahreisy Salim, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004

Barthos Basir, *Pengetahuan Anggaran Belanja Negara Rutin dan Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara Cetakan pertama, 1990.

Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Balai Aksara, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.

Fathoni Abdurahman, *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Nasroen, *Daerah Otonomi Tingkat Bawah*, Jakarta: Beringin Trading Company, 1995.

- Ndara Talizidu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara Cetakan ketiga, 1991.
- Rozak. Abdul, Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003
- Salim Peter dan Salim Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Saparin Sumber, *Tata Pemerintahan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Balai Aksara Cetakan Keempat, 2979.
- Singarimbun. Masri, Effendi.Sofian, *Metode Peneliian Survai*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, cetakan kedua, 1995.
- Siswanto Joko, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Bandung: CV. Armico, 1998.
- Solihin Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*. Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2015.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Peneliian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV, cetakan ke-15, 2010.
- Sujadi Firman, *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.
- Sujadi Firman, et.al, *Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.
- Sungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, cetakan kelima, 2011.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Surianingrat Bayu, *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Taufik. Makarao Mohammad, Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Pustaka, 1995.

Ubaedillah. *Pancasila Demokrasi dan pencegahan Korupsi*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016.

### **Jurnal**

Apriliana Riska, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017.

Aprilia Lutfi, Pengaruh Good University Governance Terhadap kapuasan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang), Skripsi Program Sarjana Fakultas FEBI UIN Walisongo Semarang, 2017.

Muhammad Syafi'i Antonio, Prophetic Values Of Business and Management, Skripsi Program Sarjana UIN Malang, Malang, 2002.

Prabowo Yulian, Tinjauan Hukum Islam Dalam Penetapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan Way Dadi Baru), Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Syahri Romadhon Muhammad Rizqi, Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung), Skripsi Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 huruf (a)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)

### **Wawancara**

Afrizal, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

Idir, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

Muslim Ehwan, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

Nasikin M, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

Wahono, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 17 Oktober 2019.

Risnawati, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 18 Oktober 2019.

Sahril, wawancara dengan penylis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 18 Oktober 2019.

Sunardi, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 18 Oktober 2019.

Sutikno, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 18 Oktober 2019.

Yunita, wawancara dengan penulis, Desa Negeri Ulangan Jaya, 18 Oktober 2019.

### **Online**

“Desa Negeri Ulangan Jaya”. (On-line), tersedia di <http://negeriulanganjaya.id/.htm> (10 September 2019)

”Good Governance dalam Islam”. (On-Line), tersedia di <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id> (27 September 2019)

Ramadhan. Abdul Sabith “Good Governance dalam Islam”, tersedia di <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id> (14 November 2019)